

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu devisa bagi negara-negara dalam meningkatkan sumber pendapatannya selain dari sektor migas dan pajak. Dilihat dari sektor pariwisata di Indonesia masih bisa untuk dikembangkan lebih optimal lagi. Pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan baik akan mempunyai daya tarik untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun wisata asing dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Hal inilah menjadi keuntungan bagi masyarakat daerah dari hasil transaksi wisatawan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uangnya untuk negara dengan rupiah. Apabila pariwisata Indonesia dapat dikemas dan dikelola dengan baik akan menjadi aset negara Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi.

Pariwisata menyumbang 10 % PDB nasional, dengan nominal tertinggi di ASEAN, PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8 % dengan *trend* naik sampai 6,9 %, jauh lebih tinggi daripada industri agrikultur, manufaktur otomotif dan pertambangan. Pariwisata juga menyumbang devisa peringkat ke-4 devisa nasional, sebesar 9,3% dibandingkan industri lainnya. Pertumbuhan penerimaan devisa pariwisata tertinggi, yaitu 13% dibandingkan industri minyak gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit yang pertumbuhannya negatif. Sedangkan pariwisata juga menyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan,

atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri. Dalam penciptaan lapangan pekerjaan sektor pariwisata tumbuh 30% dalam waktu 5 tahun (Alamsjah, 2016).

Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2003. Wilayah meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa Pulau kecil disekitarnya, diantaranya Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Lonso, luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 Km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947, 50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km² ini menyimpan beragam objek wisata alam, budaya dan kesenian sebenarnya dapat dijadikan salah satu penopang perekonomian negara dan juga dapat menyerap tenaga kerja sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal.

Infrastruktur menjadi salah satu aspek vital dalam pengembangan pariwisata. Dengan ketersediaan infrastruktur memadai dapat mempercepat pembangunan disuatu wilayah dan memenuhi kebutuhan pengunjung tentunya akan meningkat jumlah pengunjung yang berkunjung pada kawasan wisata tersebut. Penyediaan infrastruktur yang baik perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing kawasan wisata tersebut. Saat ini masih banyak kawasan di Indonesia Timur, khususnya kabupaten Manggarai Barat di kepulauan Flores masih belum menyediakan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata yang memadai.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui kecukupan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan wisata berdasarkan penilaian para wisatawan domestik, wisatawan asing, *tour guide* dan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.

1.3 Batasan Masalah

Infrastruktur yang dimasukkan dalam penelitian ini meliputi: infrastruktur pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal bus, jembatan dan jalan (kota dan kabupaten), hotel, homestay, buangan sampah, resto, telekomunikasi & TIK, ruang hijau terbuka, konektivitas/transit dan rumah sakit yang mendukung pariwisata Taman Nasional Komodo yang terletak di kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Tujuan penelitian

Menilai sampai sejauh mana kecukupan infrastruktur sebagai pendukung pariwisata Taman Nasional Komodo di kabupaten Manggarai Barat.

1.5 Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Studi Infrastruktur Pendukung Pariwisata: Kasus Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sarana evaluasi kebijakan terhadap pengambilan kebijakan dalam perbaikan dan pengadaan infrastruktur didaerah yang memiliki potensi pariwisata.
2. Sebagai tolak ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat untuk menyusun APBD.

